**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG ATAS FUNGSI BANGUNAN MASJID**

**(STUDI DI KOTA MATARAM)**

**Program Studi Ilmu Hukum**

****

**Oleh :**

**HARDIANTI PUTRI**

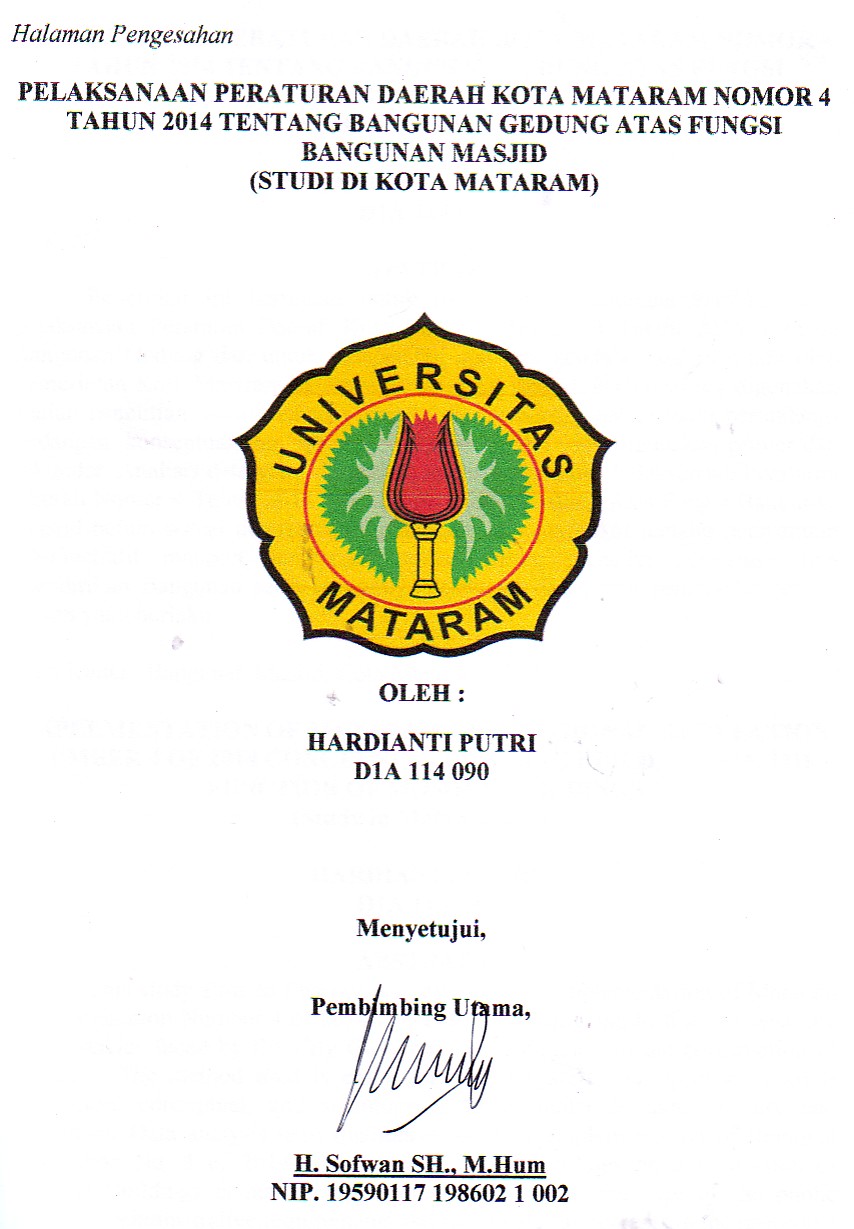
**D1A114090**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2018**

****

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG ATAS FUNGSI BANGUNAN MASJID**

**(Studi di Kota Mataram)**

**HARDIANTI PUTRI**

**D1A 114 090**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keefektifitasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam pembangunan masjid. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid belum sesuai dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang persyaratan administratif maupun persyaratan teknis dalam prosedur pengajuan Izin Mendirikan Bangunan serta kurangnya sosialisai dari pihak pemerintah terkait aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Bangunan Masjid, Kota Mataram

**IMPLEMENTATION OF MATARAM CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2014 CONCERNING BUILDING BUILDINGS ON THE FUNCTION OF MOSQUE BUILDINGS**

**(Study in Mataram City)**

**HARDIANTI PUTRI**

**D1A 114 090**

**ABSTRACT**

This study aims to find out how effective the implementation of Mataram City Regulation Number 4 of 2014 concerning Building and to find out what are the obstacles faced by the City Government of Mataram in the construction of mosques. The method used is empirical legal research. The approach used is legislation, conceptual, and sociological. Legal materials used primary and secondary. Data analysis used qualitative analysis. Implementation of Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning Building Buildings on the Function of Mosque Buildings is not yet appropriate due to the ignorance of the public regarding administrative requirements and technical requirements in the procedure for submitting Building Permits and the lack of socialization from the government regarding the applicable rules.

Keyword : Mosque Building, Mataram City.

**I. PENDAHULUAN**

Pertambahan jumlah penduduk baik secara alami maupun karena adanya migrasi, serta adanya peningkatan aktivitas kota menyebabkan terjadinya perkembangan kota. Keberagamanan aktivitas yang terjadi dalam kota melahirkan kebutuhan akan ketersediaan lahan yang tidak hanya dari segi luasan, namun juga dari segi posisi yang strategis. Fungsi dan peran kota yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya kota tersebut tidak diimbangi oleh ketersediaan lahan, salah satunya disebabkan oleh aktivitas masyarakat. Dalam laporan lembaga riset global yaitu Pew Research, mencatat pada 2010 Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara muslim terbesar di Dunia, tercatat 209,1 juta jiwa. Begitupula penduduk muslim di Kota Mataram, pada data sensus tahun 2010 tercatat jumlah penduduk muslim ialah 332,259 ribu jiwa. Kenyataan yang dapat kita lihat sekarang adalah dengan banyaknya penduduk muslim, juga banyaknya bangunan masjid yang digunakan sebagai tempat peribadatan.

Realisasi dari pembangunan bangunan masjid juga menghendaki adanya hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk terwujudnya usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan suatu bangunan tidaklah terlepas dari peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Untuk melaksanakan pembangunan masjid baik yang dilakukan oleh pribadi maupun pihak swasta diperlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dana tau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. IMB juga akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukan bahwa rencana konstruksi bangunan juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (9) dijelaskan bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam rencana blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf k Salah satu Rencana Detail Tata Ruang Kota (RTDK) yang diatur adalah Strategi pengembangan kawasan peribadatan, yang terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas bangunan & lingkungan peribadatan yang sudah ada; dan
2. Menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai serta mengoptimalkan RTH di setiap kawasan.

Rencana tata ruang sebagai hasil dari suatu penataan ruang juga memuat rumusan yang mengatur tentang zonasi ruang dalam pemanfaatannya dan memiliki keterikatan dalam bentuk suatu kesatuan. Salah satu bentuk zonasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah zonasi kawasan peribadatan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80, peraturan zonasi kawasan peribadatan dilakukan dengan ketetntuan sebagai berikut:

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi sebesar 70(tujuh puluh) persen;

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 3,5(tiga koma lima) persen;

Koefisisen Daerah Hijau (KDH) paling rendah sebesar 30(tiga puluh) persen; dan

dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti gedung pendukung kegiatan ibadah

Selain peraturan zonasi kawasan peribadatan, Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah berbentuk masjid sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanenisasi, tingkat resiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi ketinggian, dan/atau kepemilikan. Namun pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan bangunan masjid di Kota Mataram masih banyak yang belum sesuai dengan peraturan yang sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram.

Dari observasi yang telah peneliti lakukan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam proses pembangunan masjid di Kota Mataram masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid. Masalah bangunan masjid yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung contohnya adalah karena masih banyak bangunan masjid yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai untuk kendaraan para pengguna bangunan masjid. Selain itu, bangunan masjid tidak memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang sudah ditetapkan oleh Peratauran Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Serta struktur bangunan menara masjid yang dibangun ditengah pemukiman masyarakat dengan ketinggian melebihi jumlah lantai maksimum dimana ketika terjadi bencana gempa bumi ataupun bencana lainnya dapat menimbulkan resiko bagi masyarakat disekitar bangunan masjid.

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah atas proses berdirinya suatu bangunan masjid. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid (Studi Di Kota Mataram)”.**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimanakah keefektifitasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung atas Fungsi Bangunan masjid? 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam pembangunan bangunan masjid?. **Tujuan Penelitian** Untuk mengetahui bagaimana keefektifitasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam pembangunan bangunan masjid. **Manfaat Penelitian terdiri dari** Manfaat Akademis yaitu untuk Membantu perkembangan ilmu penegetahuan dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi, serta menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal baik dari kalangan pelajar, mahasiswa maupun dosen dan guru. Manfaat Teoritis yaitu Untuk Memberikan sumbangsih untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, serta sebagai kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu ke depan, khususnya dalam proses Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung atas Fungsi Bangunan Masjid. Dan Manfaat Praktis dimana Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung atas Fungsi Bangunan Masjid. **Ruang Lingkup Penelitian** inimerupakan bingkai penelitian yang menggambarkan penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti dan mana tidak. Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan perumusannya, serta untuk menjaga agar tidak menimbulkan interpretasi yang luas mengenai masalah yang dibahas, maka dalam penelitian ini perlu diberikan pembatasan-pembatasan yang membatasi ruang lingkup kajiannya.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah khusus pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid lebih khusus lagi pada fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis, penyelenggaraan Bangunan Gedung, sanksi Administratif, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Mataram dan hanya di 3 (Tiga) Kecamatan. Untuk itu ditentukan sample tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.[[1]](#footnote-1) Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung di lapangan untuk melihat secara langsung penerapan Peraturan Perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan informan dan responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.[[2]](#footnote-2)

Adapun metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aprroach*),Pendekatan Sosiologis (*Sosiological Approach*). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden maupun informan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung. b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan dokumentasi atau bahan yang tertulis melalui studi pustaka bersumber dari literatur dengan cara mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah:a)Data lapangan, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan keterangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data kepustakaan, yaitu sumber yang diperoleh dari dokumen yang berupa buku-buku, laporan-laporan, hasil penelitian ilmiah dan bahan pustaka lainnya.

**II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid.**

Masjid ialah contoh dari bangunan fasilitas peribadatan. Semua bangunan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan batin manusia sebagai makhluk yang memiliki Tuhan. Bangunan peribadatan biasanya digunakan sebagai tempat beribadah. Sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, masjid mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Setiap kegiatan pendirian bangunan di wilayah Kota Mataram, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pada prinsipnya IMB bertujuan agar terjadi keselarasan antara lingkungan dan bangunan. Selain itu, dengan IMB diharapkan agar bangunan yang akan dibangun aman bagi keselamatan jiwa penghuninya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung atas Fungsi Bangunan Masjid di 6 Kecamatan di Kota Mataram yaitu Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Mataram, Kecamatan Sandubaya, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Selaparang. Dari ketiga Kecamatan yang dijadikan sebagai sampel, hampir seluruh Pelaksanaannya belum sesuai dengan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pendirian masjid bukti legalitas suatu bangunan masjid yang dibuktikan melalui kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Fakta di lapangan menunjukan bahwa hampir seluruh bangunan masjid di Kota Mataram tidak memiliki IMB. Hasil penelitian yang peneliti lakukan dari sembilan tempat di tiga Kecamatan di Kota Mataram, delapan diantaranya tidak memiliki IMB sedangkan satu lainnya memiliki IMB tetapi tidak memenuhi persyaratan administatif maupun persyaratan teknis sebagai bangunan Gedung. Berikut adalah data masjid yang memiliki dan tidak memiliki IMB.

**Tabel 4**

**Jumlah masjid dengan kepemilikan IMB**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Lokasi Penelitian | | Nama Masjid | Kepemilikan IMB | |
| Kecamatan | Kelurahan | Ada | Tidak Ada |
| 1. | Kecamatan Mataram | 1. Kelurahan Pagutan | Asshobirin | - |  |
| 1. Kelurahan Pagesangan | Al-Mustafa | - |  |
| 1. Kelurahan Mataram | Al-Mustaqim | - |  |
| 2. | Kelurahan Sandubaya | 1. Kelurahan Dasan Cermen | Al-Isslahudin | - |  |
| 1. Kelurahan Dasar Cermen | Darul Hidayah | - |  |
| 1. Kelurahan Babakan | Syamsul Huda | - |  |
| 3. | Kelurahan Sekarbela | 1. Kelurahan Kekalik Jaya | Al-Istiqomah | - |  |
| 1. Kelurahan Kekalik Jaya | Al-Mabrur | - |  |
| 1. Kelurahan Sekarbela | Al-Raisiyah |  | - |
| Jumlah | | | 9 | 1 | 8 |

*Sumber : Data Primer diolah pada Tahun 2018*

Berdasarkan data tabel 4 dapat diperoleh persentase jumlah masjid di Kota Mataram. Dari sembilan tempat di tiga Kecamatan yang telah peneliti teliti, sebanyak delapan masjid yang belum memiliki IMB dengan persentase yaitu 88,88% sedangkan masjid yang sudah memiliki IMB yaitu hanya satu yaitu masjid Al-Raisiyah dengan persentase sebesar 11,11%.

Tempat ibadah merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap pemeluk agama. Sebagai daerah yang dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid, di Kota Mataram agama islam memiliki angka mayoritas. Masjid ialah tempat yang dipercaya oleh umat Islam sebagai tempat sholat atau tempat sujud dalam menjalankan sholat. Ketika dahi orang mendirikan sholat menyentuh tanah dalam kepatuhan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Masjid secara umum adalah tempat untuk ibadah, juga dipakai sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Menurut Mohammad Ayub : “Dengan luasnya fungsi dan peran masjid, sehingga keberadaan masjid menjadi kepentingan masyarakat luas. Masjid dibangun bersama dan untuk kepentingan bersama pula. Sekalipun masjid dibangun secara individual atau kelompok, tetapi segala urusan di masjid adalah untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan sekitar masjid.”[[3]](#footnote-3)

Kesadaran masyarakat dalam kepemilikan IMB di wilayah Kota Mataram terbilang masih sangat rendah. Kurangnya kesadaran hukum merupakan faktor yang paling utama. Dengan demikian dapat dilihat dari segi penegtahuan, pemahaman, pola sikap dan pola perilaku masyarakat itu sendiri mengenai objek yang bersangkutan yaitu mengenai IMB. Dalam rangka perwujudan amanat perundang-undangan dalam rangka pengendalian penyelengaraan bangunan gedung tidak akan cukup apabila hanya dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang saja melainkan diikuti pula dengan kesadaran masyarakat untuk melaksanakannya.

Namun tidak semua masyarakat tingkat kesadarannya rendah dalam memiliki IMB. Tidak demikian dengan pihak pengurus masjid Al-Raisiyah, berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad fuad selaku Ketua Takmir Masjid menjelaskan bahwa :

Pada tahun 2007 oleh para pihak-pihak pengurus masjid yang bertanggungjawab atas bangunan masjid Al-Raisiyah mengajukan permohonan IMB. Dengan melampirkan sertifikat wakaf, denah, gambar bangunan dan Rencana Anggaran Biaya kemudian diserahkan langsung kepada Gubernur dan Walikota untuk kemudian diterbitkan IMB.[[4]](#footnote-4)

1. **Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid**

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid terdapat beberapa kendala yang menghambat terlaksananya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid, adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut : **1)** **Kurangnya Kesadaran serta Pasrtisipasi Masyarakat.** Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid kesadaran serta partisipasi dari masyarakatnya sangatlah minim. Hal itu juga diakui oleh Lalu Asrul Hakim yang menjelaskan :“Sangat sulit untuk meyakinkan masyarakat agar masyarakat mau membuat IMB. Padahal hal tersebut juga untuk kepentingan masyarakat sendiri sebagai bukti keabsahan kepemilikan bangunan agar suatu saat tidak terjadi masalah. Jangankan untuk tempat ibadah, untuk rumah tinggal saja yang awalnya perkiraan kami ada sekitar 80 ribu di Kota Mataram, tetapi yang ber-IMB mungkin tidak sampai 10 ribu. Sangat jauh dari perkiraan, padahal jika difokuskan pada sektor itu potensi PAD cukup besar”.[[5]](#footnote-5) **2)** **Dana tidak bisa mencukupi untuk setiap pembangunan masjid** Dengan mayoritas penduduk muslim di Kota Mataram ini keinginan masyarakat untuk membangun masjid yang sangat besar serta banyaknya proposal yang diajukan masyarakat untuk pengajuan permohonan dana untuk keperluan pembangunan masjid di berbagai kecamatan di Kota Mataram tidak mampu dipenuhi seluruhnya oleh Pemerintah karena belum ada penganggaran khusus ke arah tersebut. **3) Ketidaktahuan masyarakat atas peraturan yang berlaku** Proses pembentukan peraturan daerah yang kemudian disahkan menjadi peraturan untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat akan Peraturan Perundang-undangan. Masyarakat dianggap terlalu pasif dan tidak tau mengenai peraturan yang berlaku di Kota Mataram dikarenakan minimnya atau kurangnya informasi yang mereka dapatkan terkait Izin mendirikan Bangunan karna tidak pernah dilaksanakannya sosialisasi tentang hal tersebut.

**III. PENUTUP**

1. **Simpulan**

Dari pembahasan hasil penelitian di Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan yang juga menjadi inti dari penelitian ini diuraikan berdasarkan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut : **1)** **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid di Kota Mataram** belum dilaksanakan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimana seharusnya setiap bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan memenuhi persyaratan administratif maupun persyaratan teknis. **2) Berdasarkan data pada** tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah bangunan yang tidak dilengkapi dengan IMB di Kota Mataram lebih banyak yaitu dengan persentase sebesar 88,88% daripada yang dilengkapi dengan IMB yaitu sebesar 11,11%. **3) Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kota Mataram** diketahui bahwa hampir semua bangunan masjid di Kota Mataram tidak memenuhi persyaratan teknis seperti tidak memenuhi jarak batas bangunan, ketinggian, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta lahan parkir**. 4) Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid** terdapat beberapa kendala yang menghambat terlaksananya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid seperti kurangnya kesadaran diri maupun partisipasi masyarakat dan dana tidak bisa mencukupi untuk setiap pembangunan masjid serta ketidaktahuan masyarakat tentang persyaratan administratif maupun persyaratan teknis dalam prosedur pengajuan Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait peraturan yang berlaku oleh pemerintah daerah.

1. **Saran**

Dari uraian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 1) Diharapkan kepada dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Atas Fungsi Bangunan Masjid di Kota Mataram dilaksanakan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dengan prosedur yang ditetapkan. 2) Diharapkan juga dalam penerapannya untuk pemerintah daerah dapat lebih aktif mensosialisasikan dan mengawasi serta memperhatikan peraturan yang berlaku dengan penerapannya di masyarakat dengan sebaik-baiknya agar tercapainya apa yang telah menjadi amanat perundang-undangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ayub, Mohammad, Manajemen Masjid, Gema Insani, Jakarta, 1996

Soekanto, Soedjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, Jakarta, UI-Press,1986

Soekanto, Soedjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

1. Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, UI-Press,1986, hlm. 43 [↑](#footnote-ref-1)
2. Soedjono Soekanto*, Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.42 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mohammad Ayub, Manajemen Masjid, Gema Insani, Jakarta, 1996, hlm.45. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wawancara dengan Ahmad Fuad (59 Tahun), berprofesi sebagai Wiraswasta sekaligus Ketua Takmir Masjid, berlokasi di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kamis, 31 Juli 2018, Pukul 16.05 WITA. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan Lalu Asrul Hakim (52 Tahun), Staf di Sub Bidang Perencanaan dan Promosi di Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Satu Pintu, Selasa, 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 WITA. [↑](#footnote-ref-5)